PENGADILAN AGAMA BIMA

LAPORAN SURVEI
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
SEMESTER 2
TAHUN 2021

PENGADILAN AGAMA BIMA

LAPORAN SURVEI
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
Untuk Periode Juli – Desember 2021

Jl. Gatot Subroto No. 10 Kecamatan Mpunda
Kota Bima - Nusa Tenggara Barat
telp. 0374-6191134 Fax. 0374-45156
e-mail : info@pa-bima.go.id
www.pa-bima.go.id

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI PERSEPSI KORUPSI

PADA PENGADILAN AGAMA BIMA

Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi

Nomor 52 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Korupsi

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Bima, November 2021

Ketua Tim Survei,

Arifuddin Yanto, S.Ag.
NIP. 19740715 199803 1 004

Ketua Pengadilan Agama Bima,

Hj. Riayan Fauzi,S.Ag.,M.H.
NIP. 19731231.199803.1.008

KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan publik secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Agama Bima mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Korupsi yang dapat diartikan bahwa persepsi korupsi dalam hal kualitas bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi korupsi yang diterima dengan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam persepsi korupsi di Pengadilan Agama Bima, yang diambil melalui kuesioner.

Berdasarkan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan untuk ke depannya agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Agama Bima dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Agama Bima.

November 2021

Tim Survei

DAFTAR ISI

Hal.

Lembar Pengesahan i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel v

Daftar Gambar dan Diagram vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud danTujuan 2
1.3 Landasan Hukum 2
1.4 Rencana Kerja 3
1.4.1 Persiapan 3
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data 4
1.4.3 Pelaksanaan Survei 4

BAB II METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian 5
2.2 Populasi dan Sampel 5
2.3 Pengumpulan Data 6
2.4 Pengolahan Data 7
2.5 Teknik Analisis Data 7
2.6 Tahapan Pelaksanaan 9

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil Responden 10
3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden 10
3.1.2 Kelompok Usia Responden 11
3.2 Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator 12
3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan 12
3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan 13
3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh 14
3.2.4 Indikator Transaksi Biaya 15
3.2.5 Indikator Biaya Tambahan 16
3.2.6 Indikator Hadiah 17
3.2.7 Indikator Transparansi Biaya 18
3.2.8 Indikator Percaloan 19

3.2.9 Indikator Perbuatan Curang 20
3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia 21

3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Bima 22

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 24

4.2 Rekomendasi 25

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

Hal.

Gambar 1. Model Alur Penyusunan Survei Indeks Persepsi Korupsi Menuju Zona Integritas 9

Diagram 1. Diagram Pendidikan Terakhir Responden 11

Diagram 2. Diagram Umur Responden 12

Diagram 3. Indikator Manipulasi Peraturan..... 13

Diagram 4. Indikator Penyalahgunaan Jabatan 14

Diagram 5. Indikator Menjual Pengaruh 15

Diagram 6. Indikator Transaksi Biaya..... 16

Diagram 7. Indikator Biaya Tambahan..... 17

Diagram 8. Indikator Hadiah 18

Diagram 9. Indikator Transparansi Biaya 19

Diagram 10. Indikator Percaloan 20

Diagram 11. Indikator Perbuatan Curang..... 21

Diagram 12. Indikator Transaksi Rahasia 22

Diagram 13. Indeks Persepsi Korupsi 23

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan 4
Tabel 2. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi 6
Tabel 3. Nilai Persepsi 8
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden 10
Tabel 5. Usia / Umur Responden 11
Tabel 6. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan 12
Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan 13
Tabel 8. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh 14
Tabel 9. Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya 15
Tabel 10. Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan 16
Tabel 11. Indeks Pada Indikator Hadiah 17
Tabel 12. Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya 18
Tabel 13. Indeks Pada Indikator Percaloan 19
Tabel 14. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang 20
Tabel 15. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia 21
Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Agama Bima 22
Tabel 17. Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Agama Bima . 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri (aparatur sipil negara), serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sejalan dengan pelaksanaan **Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**, Pengadilan Agama Bima berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang bebas dari korupsi dan bersih melayani.

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi

yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Penyusunan Survei Indek Persepsi Anti Korupsi ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat, menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terutama pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Agama Bima adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan memberikan rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik

Indonesia Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

b. Penyiapan Bahan

- Kuesioner
- Bagian dari kuesioner/pengantar
- Kelengkapan peralatan

c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- Jumlah Responden
- Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

d. Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

a. Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner

b. Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan

c. Pengujian kualitas dan validitas data

d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilih berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden

1.4.3 Pelaksanaan Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu enam bulan, sejak Juli 2021 hingga Desember 2021 dengan jumlah responden sebanyak 250 responden.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1	Persiapan Tim	30 Agustus 2021 – 03 September 2021
2	Survei IPK	06 September 2021 – 30 September 2021
3	Pengolahan Data	03 – 08 Oktober 2021
4	Penyusunan Laporan	10 - 15 Oktober 2021
5	Publikasi	November 2021

BAB II
METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan pada Pengadilan Agama Bima sejak Juli 2021 sampai 30 2021. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan atau dihitung dengan menggunakan rumus :

$$S = (\lambda^2 . N . P . Q)/(d2\ (N-1) + \lambda^2 . P . Q)$$

Dimana :

S = jumlah sampel
λ² = lambda (faktor pengali) dengan dk 1, taraf kesalahan 1%, 5%, 10%
N = populasi
P = (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0

Dari jumlah sebanyak 703 orang, dengan menggunakan perhitungan di atas didapatkan jumlah responden sebanyak 250 responden.

2.3 Pengumpulan Data

Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi dengan cara acak dengan metode quesioner mengenai unsur pelayanan yang telah ditetapkan dan saran perbaikan terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Bima.

Selain itu dilakukan pengumpulan data internal untuk memahami mengenai visi, misi, program, serta profil pelayanan publik dan pengunjung Pengadilan Agama Bima dengan menggunakan 10 unsur atau indikator, adapun 10 unsur atau indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran survey ini meliputi :

Tabel 2. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

NO	RUANG LINGKUP
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Tranparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

2.4 Pengolahan Data

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi dihitung dengan menggunakan "*nilai rata-rata tertimbang*" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survey terhadap sepuluh unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BOBOT NILAI RATA-RATA TERTIMBANG} = \frac{\text{JUMLAH BOBOT}}{\text{JUMLAH UNSUR}} = \frac{1}{9} = 0{,}11$$

Untuk memperoleh nilai Survei Persepsi Anti Korupsi unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPK} = \frac{\text{TOTAL DARI NILAI PERSEPSI PER UNSUR}}{\text{TOTAL UNSUR YANG TERISI}} \text{ X NILAI PENIMBANG}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survei Persepsi Anti Korupsi yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

IPK Unit Pelayanan x 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan memberikan bobot yang berbeda terhadap 10 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap satu.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menentukan *indesks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama : Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua : Mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**, seperti yang ada dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100	4	Bersih dari korupsi

2.6 Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Gambar 1. Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil Responden

3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil suvei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SLTA sebanyak 48,40%. Untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	PERSENTASE
1	SD kebawah	12	4,80%
2	SLTP	49	19,60%
3	SLTA	121	48,40%
4	D1/D2/D3/D4	26	10,40%
5	S1	37	14,80%
6	S2 keatas	5	2,00%
TOTAL		**250**	**100,00%**

Sumber : Hasil Pengolahan Data Survei

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pendidikan Terakhir di atas, berikut secara visual disajikan data dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 1. Diagram Pendidikan Terakhir Responden

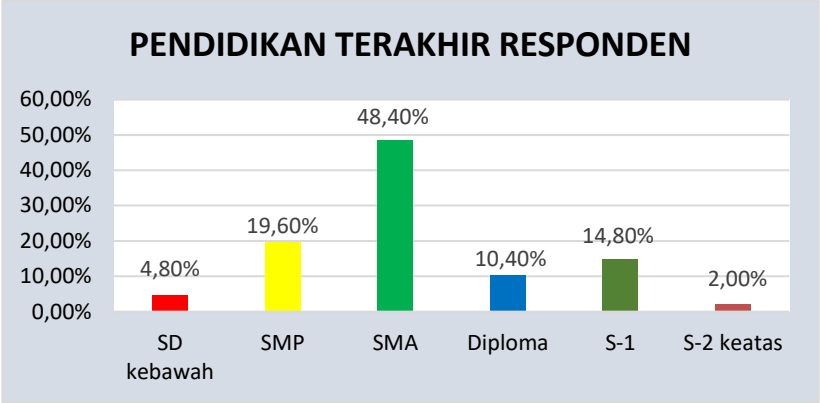

3.1.2 Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berusia antara 30 tahun s/d 39 tahun dengan persentase 36.00%.

Tabel 5. Usia / Umur Responden

NO	UMUR RESPONDEN	Frekuensi	Persentase
1	< 20 Thn	7	2,80%
2	20 - 29 Thn	67	26,80%
3	30 - 39 Thn	90	36,00%
4	40 - 49 Thn	68	27,20%
5	≥ 50 Thn	18	7,20%
	TOTAL	**250**	100,00%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Usia/Umur Responden di atas, berikut secara visual disajikan data dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 2. Diagram Umur Responden

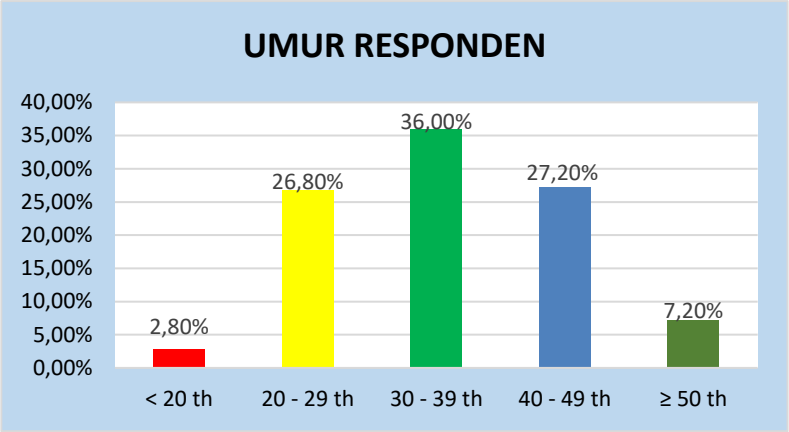

3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks **3.66.** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima Bersih Dari Korupsi.

Tabel 6. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

Manipulasi Peraturan					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Tidak sesuai prosedur	1	0	0%	0
2	Jarang sesuai prosedur	2	4	2%	8
3	Sering sesuai prosedur	3	78	31%	234
4	Selalu sesuai prosedur	4	168	67%	672
	Total		250	100,00%	914
NRR per Unsur					3,66

Sumber : Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 3. Indikator Manipulasi Peraturan

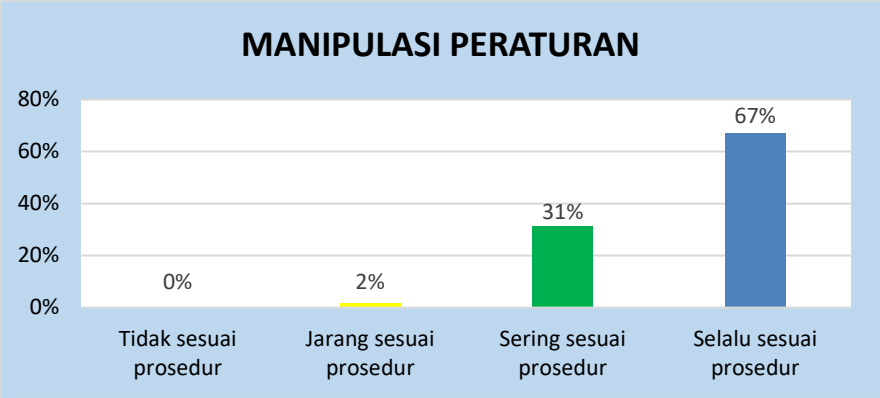

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks **3.64.** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari Korupsi.

Tabel 7. Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan Jabatan					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu minta imbalan	1	0	0,00%	0
2	Sering minta imbalan	2	1	0,40%	2
3	Jarang minta imbalan	3	87	34,80%	261
4	Tidak minta imbalan	4	162	64,80%	648
	Total		250	100,00%	911
NRR per Unsur					3,64

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 4. Penyalahgunaan Jabatan

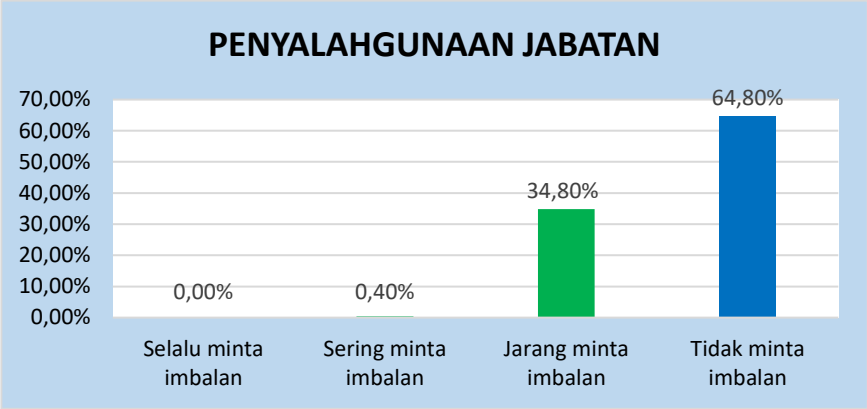

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator menjual pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks **3.65.** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

Tabel 8. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

Menjual Pengaruh					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu dihubungi	1	0	0,00%	0
2	Sering dihubungi	2	3	1,20%	6
3	Jarang dihubungi	3	82	32,80%	246
4	Tidak pernah dihubungi	4	165	66,00%	660
	Total		250	100,00%	912
	NRR per Unsur				3,65

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 5. Indikator Menjual Pengaruh

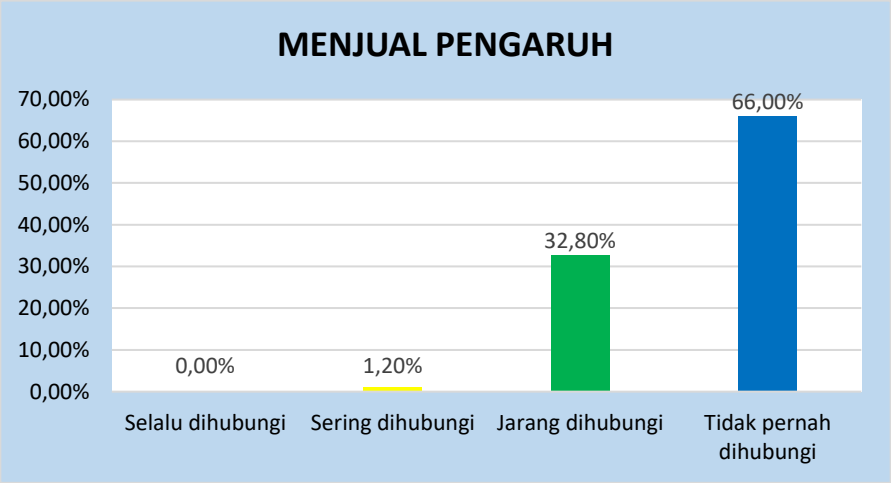

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3.63.** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

Tabel 9. Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

Transaksi Biaya					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Tidak pernah mudah	1	0	0,00%	0
2	Kadang mudah	2	2	0,80%	4
3	Mudah	3	89	35,60%	267
4	Selalu mudah	4	159	63,60%	636
	Total		250	100,00%	907
	NRR per Unsur				3,63

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 6. Indikator Transaksi Biaya

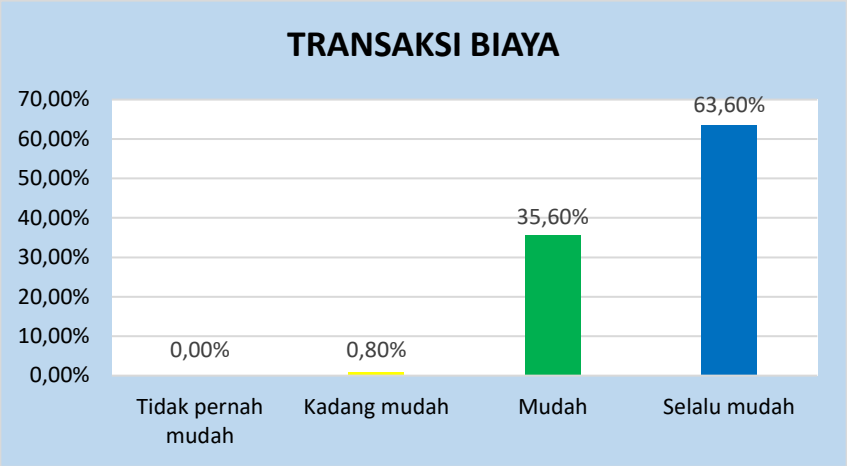

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks **3.74.** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

Tabel 10. Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

Biaya Tambahan					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu ada biaya tambahan	1	1	0,40%	1
2	Sering ada biaya tambahan	2	0	0,00%	0
3	Jarang ada biaya tambahan	3	62	24,80%	186
4	Tidak ada biaya tambahan	4	187	74,80%	748
	Total		250	100,00%	935
NRR per Unsur					3,74

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 7. Indikator Biaya Tambahan

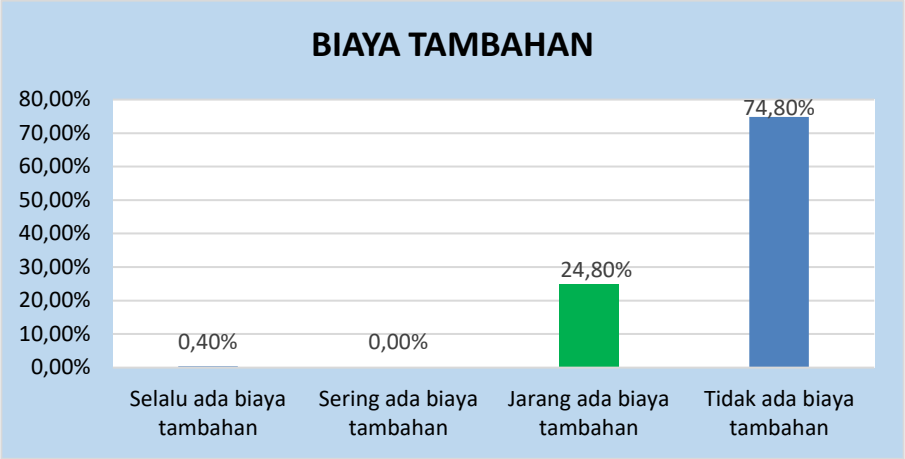

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks **3.58.** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

Tabel 11. Indeks pada Indikator Hadiah

Hadiah					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu memberikan	1	0	0,00%	0
2	Sering memberikan	2	0	0,00%	0
3	Jarang memberikan	3	104	41,77%	312
4	Tidak pernah memberikan	4	145	58,23%	580
	Total		249	100,00%	892
NRR per Unsur					3,58

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 8. Indikator Hadiah

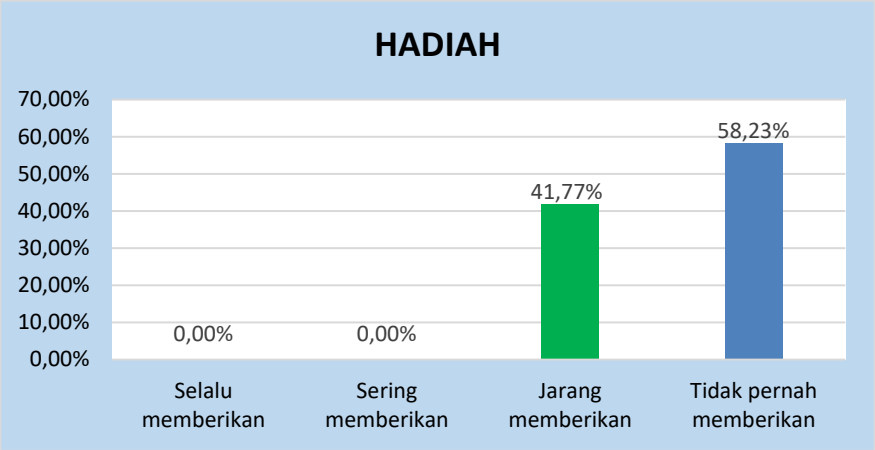

3.2.7 Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3.76.** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

Tabel 12. Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

Tranparansi Biaya					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Tidak ada bukti	1	0	0,00%	0
2	Jarang ada bukti	2	0	0,00%	0
3	Sering ada bukti	3	61	24,40%	183
4	Selalu ada bukti	4	189	75,60%	756
	Total		250	100,00%	939
NRR per Unsur					3,76

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 9. Indikator Transparansi Biaya

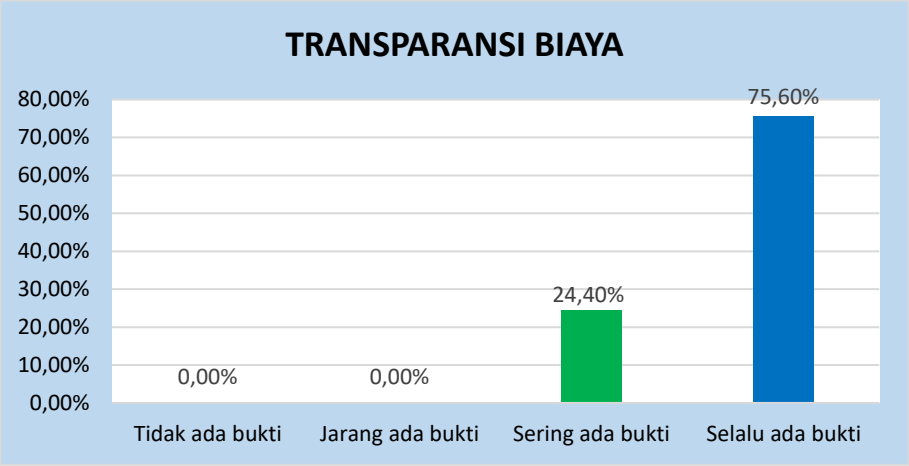

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks **3.65.** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

Tabel 13. Indeks pada Indikator Percaloan

Percaloan					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu ada	1	0	0,00%	0
2	Sering ada	2	0	0,00%	0
3	Jarang ada	3	88	35,20%	264
4	Tidak ada	4	162	64,80%	648
	Total		250	100,00%	912
NRR per Unsur					3,65

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 10. Indikator Percaloan

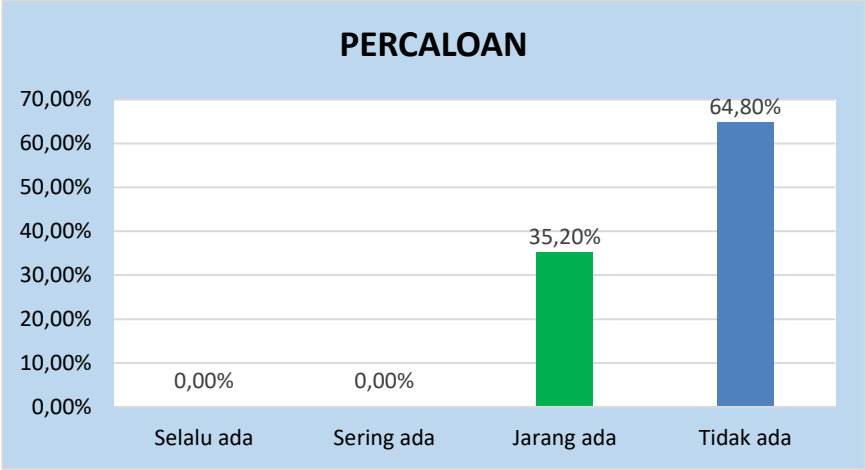

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada indeks **3.66.** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

Tabel 14. Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

Perbuatan Curang					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu	1	0	0,00%	0
2	Sering	2	0	0,00%	0
3	Jarang	3	86	34,40%	258
4	Tidak ada	4	164	65,60%	656
	Total		250	100,00%	914
NRR per Unsur					3,66

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 11. Indikator Perbuatan Curang

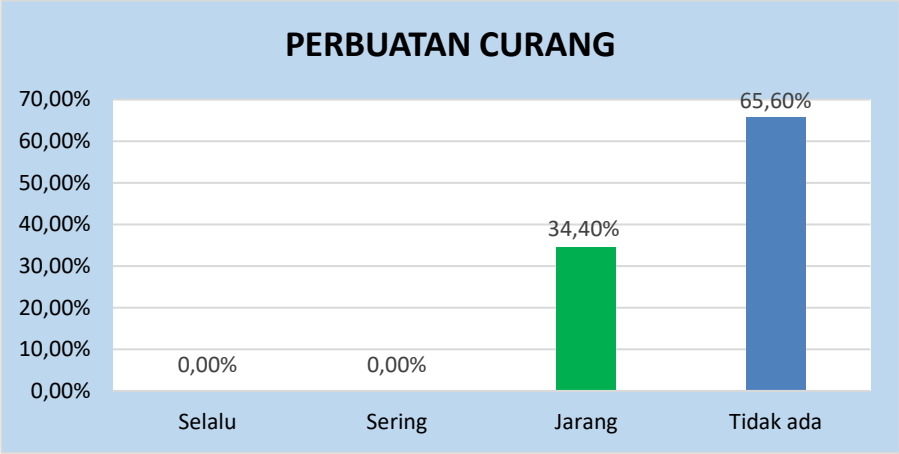

3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks **3.81.** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

Tabel 15. Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

Transaksi Rahasia					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu	1	0	0,00%	0
2	Sering	2	0	0,00%	0
3	Jarang	3	48	19,20%	144
4	Tidak pernah	4	202	80,80%	808
	Total		250	100,00%	952
NRR per Unsur					3,81

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 12. Indikator Transaksi Rahasia

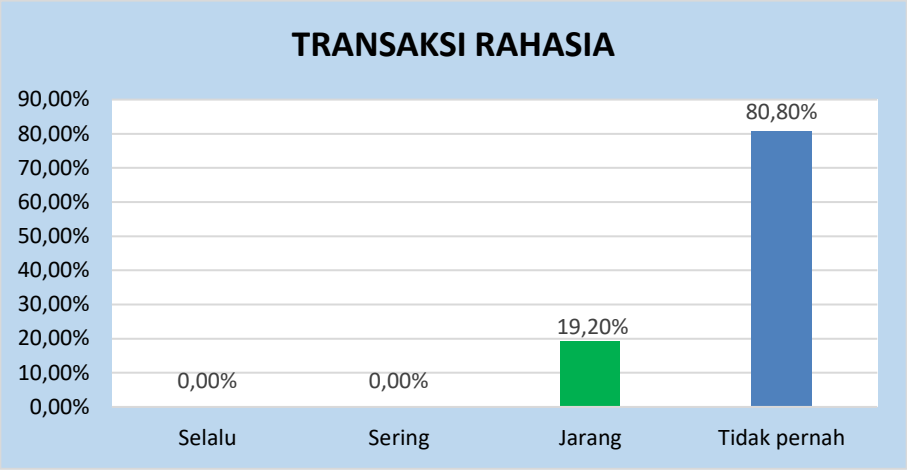

3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Bima

Dari 10 unsur dan/atau indikator persepsi korupsi, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima sebesar **3.68.**

Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Agama Bima

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai IPK	Mutu	Kinerja
1	Manipulasi Peraturan	3,66	**3,68**	**4,00**	**Bersih dari Korupsi**
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,64			
3	Menjual Pengaruh	3,65			
4	Transaksi Biaya	3,63			
5	Biaya Tambahan	3,74			
6	Hadiah	3,58			
7	Tranparansi Biaya	3,76			
8	Percaloan	3,65			
9	Perbuatan Curang	3,66			
10	Transaksi Rahasia	3,81			
	Rata-rata Tertimbang	**91,90**			

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 13. Indeks Persepsi Korupsi

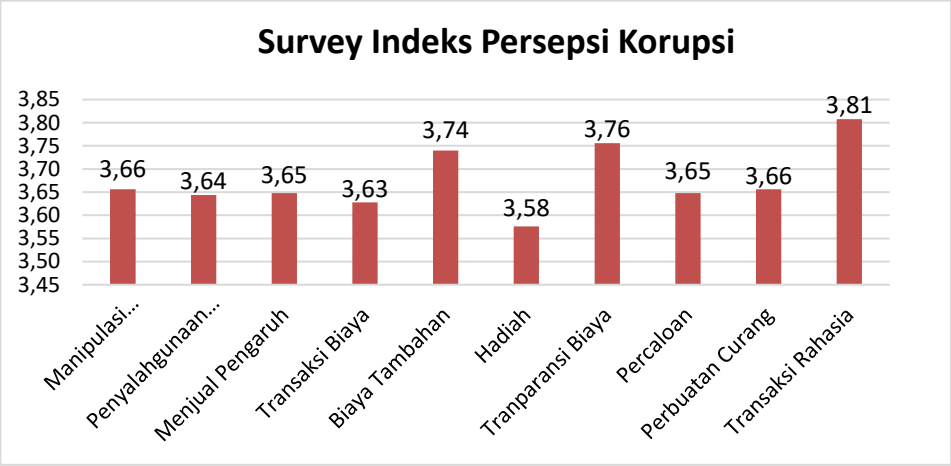

Indeks Persepsi Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor **3.68** indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI.** Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3.26 – 4.00.

Tabel 17. Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Bima

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 – 100	4	Bersih dari korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Bima memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3.68** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI.**

   Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

   1. Indikator Manipulasi Peraturan, dengan indeks 3.66
   2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, dengan indeks 3.64
   3. Indikator Menjual Pengaruh, dengan indeks 3.65
   4. Indikator Transaksi Biaya, dengan indeks 3.63
   5. Indikator Biaya Tambahan, dengan indeks 3.74
   6. Indikator Hadiah, dengan indeks 3.58
   7. Indikator Transparansi Biaya, dengan indeks 3.76
   8. Indikator Percaloan, dengan indeks 3.65
   9. Indikator Perbuatan Curang, dengan indeks 3.66
   10. Indikator Transaksi Rahasia, dengan indeks 3.81.

2. Berdasarkan hasil survei IPK dari 10 (sepuluh) indikator terhadap 250 responden diperoleh nilai sebesar 3.68.

3. Kategori / ruang lingkup dengan indeks tertinggi adalah persepsi Transaksi Rahasia yaitu sama sebesar 3.81, dan indeks yang terendah dengan perolehan nilai persepsi 3.58 yaitu unsur Hadiah.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil survei IPK semester 2 periode bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2021 maka diperoleh beberapa rekomendasi bermanfaat untuk perbaikan dalam pelayanan publik, yaitu :

a. Harap meningkatkan mutu / kualitas pelayanan.

b. Sosialisasi Tindakan gratifikasi bagi Aparatur Pengadilan Agama Bima

c. Tindak tegas Hakim, atau aparat peradilan yang berbuat KKN.

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2021

29 8

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama : A.....(boleh inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan : .....
3. Umur (Tahun) : ....54.....
4. Jenis Kelamin : (1) Laki – laki 2. Perempuan
5. Pendidikan terakhir : 1. Tidak sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
   2. SD 6. Sarjana (S1)
   (3) SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
   4. SLTA
6. Pekerjaan Utama : 1. PNS 5. Petani/Nelayan
   2. TNI/Polri 6. Pedagang
   3. Pegawai Swasta 7. Pelajar / Mahasiswa
   (4) Wiraswasta/Usahawan 8. Lainnya.....
7. Jenis Layanan : .....

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei				
Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)		**Jawaban**		**Kode Pengolahan**
1	Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? **(Manipulasi Peraturan)**	1	Tidak Sesuai Prosedur	
		2	Jarang Sesuai Prosedur	
		3	Sering Sesuai Prosedur	
		(4)	Selalu Sesuai Prosedur	
2	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? **(Penyalahgunaan Jabatan)**	1	Petugas Selalu Minta Imbalan	
		2	Petugas Sering Minta Imbalan	
		3	Petugas Jarang Minta Imbalan	
		(4)	Petugas Tidak Minta Imbalan	
3	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? **(Menjual Pengaruh)**	1	Selalu	
		2	Sering	
		3	Jarang	
		(4)	Tidak Pernah	
4	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? **(Transaksi Biaya)**	1	Tidak Pernah Mudah	
		2	Kadang Mudah	
		(3)	Mudah	
		4	Selalu Mudah	
5	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	1	Selalu Ada Biaya Tambahan	
		2	Sering Ada Biaya Tambahan	

	(Biaya Tambahan)	3 (4)	Jarang Ada Biaya Tambahan Tidak Ada Biaya Tambahan	
6	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? **(Hadiah)**	1 2 3 (4)	Selalu Sering Jarang Tidak Pernah	
7	Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? **(Transparansi Biaya)**	1 2 3 (4)	Tidak Pernah Jarang Sering Selalu	
8	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? **(Percaloan)**	1 2 3 (4)	Selalu Sering Jarang Tidak Pernah	
9	Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? **(Perbuatan Curang)**	1 2 3 (4)	Selalu Sering Jarang Tidak Pernah	
10	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan? **(Transaksi Rahasia)**	1 2 3 (4)	Selalu Sering Jarang Tidak Pernah	

PETUGAS PELAKSANA :

1. **Petugas :**
   - Nama : Drs. H. Iketo..
   - Tanda Tangan : ....
   - Tanggal Pelaksana : 20-09-2021..

2. **Pencacah/Penghitung hasil survei :**
   - Nama : ....
   - Tanda Tangan : ....
   - Tanggal Pelaksana : ....

3. **Pengawas/Pemeriksa :**
   - Nama : ....
   - Tanda Tangan : ....
   - Tanggal Pelaksana : ....

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2021

(56)

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama : M/Kmch .....(boleh inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan : .....
3. Umur (Tahun) : 40 .....
4. Jenis Kelamin : (1.) Laki – laki 2. Perempuan
5. Pendidikan terakhir : 1. Tidak sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
   2. SD 6. Sarjana (S1)
   3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
   (4.) SLTA
6. Pekerjaan Utama : 1. PNS (5.) Petani/Nelayan
   2. TNI/Polri 6. Pedagang
   3. Pegawai Swasta 7. Pelajar / Mahasiswa
   4. Wiraswasta/Usahawan 8. Lainnya.....
7. Jenis Layanan : Akta Cera

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei				
Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)		**Jawaban**		**Kode Pengolahan**
1	Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? **(Manipulasi Peraturan)**	1 2 3 (4)	Tidak Sesuai Prosedur Jarang Sesuai Prosedur Sering Sesuai Prosedur Selalu Sesuai Prosedur	
2	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? **(Penyalahgunaan Jabatan)**	1 2 3 (4)	Petugas Selalu Minta Imbalan Petugas Sering Minta Imbalan Petugas Jarang Minta Imbalan Petugas Tidak Minta Imbalan	
3	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? **(Menjual Pengaruh)**	1 2 3 (4)	Selalu Sering Jarang Tidak Pernah	
4	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? **(Transaksi Biaya)**	1 2 3 (4)	Tidak Pernah Mudah Kadang Mudah Mudah Selalu Mudah	
5	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	1 2	Selalu Ada Biaya Tambahan Sering Ada Biaya Tambahan	

	(Biaya Tambahan)	3	Jarang Ada Biaya Tambahan	
		(4)	Tidak Ada Biaya Tambahan	
6	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? **(Hadiah)**	1	Selalu	
		2	Sering	
		3	Jarang	
		(4)	Tidak Pernah	
7	Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? **(Transparansi Biaya)**	1	Tidak Pernah	
		2	Jarang	
		3	Sering	
		(4)	Selalu	
8	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? **(Percaloan)**	1	Selalu	
		2	Sering	
		3	Jarang	
		(4)	Tidak Pernah	
9	Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? **(Perbuatan Curang)**	1	Selalu	
		2	Sering	
		3	Jarang	
		(4)	Tidak Pernah	
10	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan? **(Transaksi Rahasia)**	1	Selalu	
		2	Sering	
		3	Jarang	
		(4)	Tidak Pernah	

PETUGAS PELAKSANA :

1. **Petugas :**
   - Nama : Drs. H. [illegible]
   - Tanda Tangan : .....
   - Tanggal Pelaksana : 30-09-21

2. **Pencacah/Penghitung hasil survei :**
   - Nama : .....
   - Tanda Tangan : .....
   - Tanggal Pelaksana : .....

3. **Pengawas/Pemeriksa :**
   - Nama : .....
   - Tanda Tangan : .....
   - Tanggal Pelaksana : .....

KUISIONER IKP

DATA PENCACAH

Nama :
NIP :

DATA UNIT PELAYANAN

Unit Pelayanan : Pengadilan Agama Bima
Jenis Pelayanan : Pengadilan

DATA MASYARAKAT

Umur :

Ket	Jumlah	Persen
1. < 20 Thn	7	2,80%
2. 20 - 29 Thn	67	26,80%
3. 30 - 39 Thn	90	36,00%
4. 40 - 49 Thn	68	27,20%
5. ≥ 50 Thn	18	7,20%
TOTAL	250	100,00%

Jenis Kelamin :

Ket	Jumlah	Persen
1. Laki-laki	107	42,80%
2. Perempuan	143	57,20%
TOTAL	250	100,00%

Pendidikan Terakhir :

Ket	Jumlah	Persen
SD kebawah	12	4,80%
SLTP	49	19,60%
SLTA	121	48,40%
D1/D2/D3/D4	26	10,40%
S1	37	14,80%
S2 keatas	5	2,00%
TOTAL	250	100,00%

NOMOR KUISIONER	Umur	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
1	32	3	1	1	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3
2	19	1	2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4
3	46	4	2	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
4	25	2	2	3	5	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4
5	42	4	1	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4
6	25	2	2	2	5	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4
7	21	2	1	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4
8	28	2	1	2	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4
9	18	1	1	2	5	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4
10	27	2	1	3	1	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3
11	33	3	2	2	1	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4
12	39	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4
13	34	3	2	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4
14	26	2	2	1	5	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4
15	27	2	2	5	1	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3
16	24	2	1	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4
17	29	2	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
18	36	3	1	5	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4
19	37	3	2	3	5	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3
20	29	2	1	1	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4
21	42	4	2	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	44	4	1	5	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3
23	33	3	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
24	33	3	1	2	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3
25	59	5	2	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3
26	27	2	2	3	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4
27	21	2	1	2	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
28	26	2	2	1	5	3	4	2	3	4	3	3	4	3	4
29	54	5	1	2	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
228	36	3	1	4	2	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4
229	39	3	1	5	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4
230	28	2	2	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
231	34	3	2	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4
232	30	3	1	2	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4
233	33	3	1	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4
234	29	2	1	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
235	22	2	1	5	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4
236	48	4	1	5	6	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
237	36	3	1	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4
238	54	5	2	1	2	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4
239	45	4	1	6	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4
240	38	3	2	3	6	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4
241	48	4	2	3	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4
242	23	2	1	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4
243	36	3	1	4	5	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4
244	39	3	1	5	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
245	28	2	2	5	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4
246	34	3	2	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4
247	30	3	1	2	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
248	36	3	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
249	37	3	2	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4
250	49	4	1	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4
				TOTAL		914	911	912	907	935	894	939	912	914	952
				Jumlah Quesioner		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
				Rata-Rata		3,66	3,64	3,65	3,63	3,74	3,58	3,76	3,65	3,66	3,81
				Rata-Rata x bobot		0,37	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,38	0,36	0,37	0,38
				Nilai Rata-Rata Terembang		3,66									
				IPK		91,90									
						A									
						Sangat Baik									